

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh :

Dr.Ir.H. Ali Hanapiah Muhi, MP *

Berbagai permasalahan melilit lingkungan hidup kita. Secara garis besar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dari berbagai aspek, yaitu :

a. Pertumbuhan Penduduk

Masalah pertumbuhan penduduk merupakan permasalahan sosial yang paling mendesak di negara-negara yang tergolong negara berkembang dan negara terbelakang. Dimana, umumnya negara-negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan ikutan lainnya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terlalu cepat akan menimbulkan implikasi, yaitu semakin besar jumlah penduduk yang harus dipenuhi kebutuhannya akan pangan, sandang, papan, kesempatan kerja, kebutuhan akan hiburan dan sebagainya.

Ada tiga ciri-ciri utama yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan di Indonesia dewasa ini, yaitu : (1). Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif besar dan perlu ditekan, (2). Penyebaran penduduk antar daerah yang kurang berimbang, dan

(3). Kualitas kehidupan penduduk yang relatif rendah dan perlu ditingkatkan (Arsyad, L., 1992).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif besar. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat 237,6 juta jiwa. Jumlah ini bertambah sekitar 32,5 juta jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya yang tercatat di tahun 2000. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan hal ini dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI, Senin (16/8/2010) di Gedung Kura-Kura MPR/DPR/DPD RI (Caroline Damanik, dan Glori K. Wadrianto, 2010).

Tingkat pertumbuhan penduduk yang besar ternyata tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan yang besar pula, dan masih sangat rendahnya tingkat pemupukan modal. Diprediksi bahwa tingkat ketersediaan modal yang rendah akan berkaitan langsung dengan rendahnya kemampuan negara untuk menopang pertumbuhan penduduknya. Menurut Jhingan (2010) sekiranya terjadi peningkatan *out-put* sebagai akibat perbaikan teknologi dan pemupukan modal, maka peningkatan tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang besar, dikarenakan peningkatan *out-put* tersebut akan segera hilang ditelan pertumbuhan penduduk yang besar.

Akibat tingkat pertumbuhan penduduk yang besar (terutama tingkat kelahiran) adalah akan terjadi komposisi penduduk usia muda menjadi lebih besar. Hal ini akan berakibat pada cepatnya pertambahan jumlah tenaga kerja. Idealnya pertambahan tenaga kerja harus dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Selain itu berbagai kebutuhan hidup lainnya juga harus tersedia. Persoalan berikut akan timbul jika berbagai kebutuhan hidup penduduk termasuk ketersediaan lapangan kerja tidak mampu

terpenuhi dengan baik. Berbagai permasalahan sosial sudah tentu tidak dapat dielakkan.

Konsumsi beras per kapita oleh masyarakat Indonesia mencapai 139 kilogram per kapita per tahun (PANAP Rice Sheets *dalam* Anonim, *tt.*). Jumlah penduduk Indonesia 237,6 juta jiwa. Berarti kebutuhan beras per tahun adalah 33.026.400.000 kilogram (33.026 juta ton) per tahun. Anonim (2011a) mengungkapkan bahwa produksi padi 2010 sebesar 66,41 juta ton gabah kering giling (GKG) meningkat sebanyak 2,01 juta ton (3,13 persen) dibandingkan tahun 2009. Dengan produksi sebanyak itu, terdapat surplus beras mencapai 3,5 - 4 juta ton. Artinya, saat ini pertambahan produksi padi Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan penduduk, bahkan masih terdapat surplus.

Permasalahan yang muncul terkait dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Apakah produksi beras akan selalu mampu menopang pertumbuhan penduduk yang terus terjadi di masa-masa mendatang ? Hayu Parasati (Direktur Perkotaan dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010) mengungkapkan fakta bahwa sebanyak 110 ribu hektar lahan pertanian terancam dialihfungsikan menjadi lahan nonpertanian tiap tahun. Jika ini terus berlanjut, dikhawatirkan lahan pertanian irigasi akan semakin menyusut dari 7,3 juta hektar saat ini menjadi 4,3 juta hektar. "Di daerah perdesaan, alih fungsi lahan dari pertanian irigasi menjadi lahan non pertanian bisa mencapai 110 ribu hektar per tahun. Kalau tidak *direview*, nanti hanya akan menjadi 4,3 juta hektar. Padahal, 80% dari daerah di Indonesia merupakan daerah perdesaan. Sekitar 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perdesaan. Selain itu, sektor pertanian di perdesaan banyak menyerap pengangguran sebagai tenaga kerja. Jadi, dengan adanya

pengalihfungsian lahan pertanian, maka akan mempersempit kesempatan kerja di sektor pertanian (Anonim, 2010b). Pertumbuhan penduduk membawa konsekuensi pula terhadap peningkatan dan pertumbuhan permukiman dan perkotaan, pertumbuhan industri dan pariwisata,

b. Meningkatnya Kebutuhan Air Bersih dan Lahan

Air selain berguna untuk keperluan langsung dalam kehidupan sehari-hari juga berfungsi untuk membantu berbagai usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti untuk kegiatan pertanian, pembangkit listrik tenaga air, industri, transportasi dan lain-lain. Air berfungsi pula sebagai tempat hidup berbagai jenis hewan yang berguna bagi manusia. Selain itu, di dalam air dan lautan terkandung berbagai potensi sumber daya alam lainnya baik hayati maupun nonhayati yang berguna bagi kehidupan umat manusia.

Secara alamiah, air selalu bergerak mengikuti pergerakan siklus. Air meninggalkan permukaan tanah dan tubuh tanah dalam bentuk uap air. Jumlah air yang meninggalkan tanah menuju atmosfer dan yang turun dari atmosfer dalam bentuk presipitasi pada waktu tertentu adalah hampir sama. Air hujan yang jatuh pada permukaan tanah sebagian mengalir di permukaan tanah (*run off*) menuju sungai, danau dan lautan. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah (*infiltrasi*) melalui pori-pori tanah. Air yang meresap ke dalam tanah inilah yang disebut air tanah. Air tanah ini bergerak (*perkolasi*) terus ke lapisan tanah yang lebih dalam dan kemudian berkumpul menjadi air tanah bebas (*ground water*). Aliran air tanah (*interflow*) bergerak menuju sungai, danau dan lautan. Tidak semua air atau

hujan dapat mencapai tanah, sungai, danau dan lautan. Karena dalam perjalanan air menuju sungai, danau dan lautan ini sebagian air menguap melalui permukaan tanah, melalui permukaan tumbuhan, melalui manusia dan hewan. Penguapan air sangat dipengaruhi oleh kondisi suhu lingkungan dimana air tersebut berada.

Sirkulasi air setiap waktu tidaklah merata di permukaan bumi. Hal ini mengakibatkan jumlah air yang terdapat pada setiap wilayah dan setiap waktu tidaklah sama. Bisa saja di suatu wilayah terjadi kebanjiran, tetapi sebaliknya di wilayah lain terjadi kekeringan. Jumlah air yang terdapat di bumi diperkirakan sekitar 1,3 – 1,4 milyar km³ (Jumin, H.B., 1989). Sekitar 97 persen dari jumlah air tersebut terdapat di lautan (air asin), 3 persen dalam bentuk air tawar. Dari total air tawar tersebut terdapat dalam berbagai bentuk (Sudaryoko *dalam* Katili, 1983), yaitu:

- 75 persen dalam bentuk salju dan es;
- 24 persen berupa air tanah;
- 1 persen berupa air permukaan.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.508 buah, garis pantai sepanjang 81.000 km, luas lautnya 3,1 juta km². Berdasarkan UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) tahun 1982, bahwa Indonesia diberi hak kewenangan memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km² yang meliputi ekplorasi, eksploitasi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, penelitian dan yurisdiksi mendirikan instalasi atau pulau buatan. Batas terluar ZEE ini adalah 200 mil dari garis pantai pada saat surut terendah atau *base line* (Dahuri, R. *dkk.*, 1997). Sebagian besar sumber daya alam kelautan belum dimanfaatkan secara optimal, seperti minyak dan gas, timah, bijih

besi, bauksit, pasir kuarsa dan lain-lain. Selain itu sebagian besar kapasitas sumber daya perikanan laut dan perikanan darat kita juga belum dimanfaatkan secara maksimal.

Diantara sumber daya alam yang vital bagi suatu wilayah adalah tanah. Hampir semua jenis kebutuhan umat manusia berupa pangan, sandang dan papan secara langsung maupun tidak langsung sangat tergantung pada tanah.

Tanah merupakan prasarana utama sebagai tempat berbagai aktivitas manusia dan sekaligus penyedia berbagai bahan dasar kebutuhan umat manusia. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat multi fungsi. Diantara fungsi tanah adalah :

- a. Tanah berfungsi sebagai prasarana tempat berlangsungnya aktivitas manusia, diantaranya :
 - tempat mendirikan rumah;
 - tempat mendirikan pabrik;
 - tempat mendirikan sekolah;
 - tempat bercocok tanam;
 - tempat memelihara ternak;
 - tempat berlalu lintas;
 - dan lain-lain.
- b. Tanah berfungsi sebagai penyedia berbagai bahan kebutuhan dasar manusia, meliputi berbagai bahan alam yang terkandung di dalam bumi dan berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia, antara lain :
 - minyak bumi, gas alam, bahan tambang (emas, tembaga, timah, aluminium dan lain-lain);
 - air tanah;
 - tanah itu sendiri dapat secara langsung bertindak sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi berbagai barang

kebutuhan manusia, seperti tanah sebagai bahan baku industri semen, pabrik bata merah, pabrik genteng dan sebagainya;

- dan lain-lain.

Pada awalnya sebelum tanah secara meluas dieksploitasi dan diperlukan sebagai tempat usaha yang produktif, para peternak (ternak sapi, kerbau, domba, dan lain-lain) dapat membiarkan hewan ternaknya lepas secara bebas untuk mencari makanan di atas permukaan bumi yang luas. Setelah manusia mengenal sistem bercocok tanam, maka tanah dibutuhkan sebagai tempat bercocok tanam. Ternak piaraan mulai dibatasi kebebasannya mencari makanan secara bebas. Tanah mulai dikuasai secara pribadi oleh individu-individu masyarakat.

Pertanian merupakan salah satu kegiatan manusia yang mengeksploitasi sumber daya tanah dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam mengeksploitasi tanah untuk kegiatan pertanian, manusia menerapkan berbagai teknologi mulai dari teknologi yang sederhana bersifat tradisional sampai teknologi yang canggih. Semuanya menjadikan tanah sebagai objek untuk kegiatan produktif pertanian.

Dalam perkembangannya, tanah menjadi sesuatu barang yang berharga dan memiliki nilai ekonomi. Sebagai sumber daya alam, tanah merupakan faktor produksi yang amat penting dan strategis. Namun dalam kepemilikan atau penguasaan tanah sebagai faktor produksi luasnya mengalami penyusutan, yang semakin hari semakin mengecil dibandingkan dengan jumlah penduduk di muka bumi. Fenomena ini muncul karena luas daratan di permukaan bumi tidak mengalami penambahan, sedangkan jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah banyak. Hal tersebut

menyebabkan bidang-bidang tanah yang dikuasai anggota masyarakat menjadi semakin terbatas luasnya dan letaknya berpencar-pencar.

Dalam masyarakat pedesaan yang agraris, kondisi ini menyebabkan bidang-bidang tanah yang membentuk usaha tani tidak selalu berada dalam satu kawasan. Usaha tani yang satu dengan usaha tani yang lain letaknya terpisah (berpencar) dengan tingkat kesuburan yang belum tentu sama. Usaha tani yang berpencar-pencar tersebut menyebabkan usaha tani menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

Petani di pedesaan agraris terutama di pulau Jawa atau daerah-daerah yang berpenduduk padat, umumnya luas kepemilikan tanah pertanian sangat kecil, kurang lebih sekitar 0,25 Ha atau kurang dari 0,5 Ha. Pertanian demikian dikenal dengan istilah petani gurem. Bahkan sebagian dari petani di pedesaan tidak memiliki tanah garapan sendiri, melainkan berstatus sebagai buruh tani atau petani penyakap (penyewa tanah). Gejala ini sudah semakin meluas di pedesaan agraris di daerah berpenduduk padat.

Menurut Hakim, N, Nyakpa, Y, Lubis, A.M, Nugroho, Saul, R, Diha, Go Ban Hong dan Bailey (1986) bahwa luas daratan Indonesia seluruhnya sekitar 200 juta Ha. Sekitar 168 juta Ha tersebar di empat pulau besar di luar Jawa, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Dari 168 juta Ha tersebut, 123 juta Ha berupa tanah lahan kering dan sisanya 39 juta Ha berupa lahan basah baik berupa rawa pasang surut maupun rawa lebak. Tanah daratan yang dimiliki Indonesia sangat potensial sebagai lahan pertanian dan lahan produksi lainnya.

Bagi masyarakat di pedesaan maupun perkotaan tanah merupakan modal dasar yang vital. Tidak heran bagi kita, di

kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan dijumpai sekelompok orang yang disebut juragan tanah. Umumnya orang yang menguasai sebagian besar tanah mempunyai posisi yang strategis dalam strata sosial masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan politis yang strategis dalam masyarakat.

Dalam menggerakkan pembangunan masyarakat di pedesaan, faktor keberadaan tanah sebagai sumber daya alam harus menjadi salah satu titik perhatian. Dimana masyarakat pedesaan di dominasi oleh masyarakat pertanian. Di sini tanah merupakan faktor produksi dan pendukung aktivitas kehidupan masyarakat yang utama.

Karena semakin terbatasnya ketersediaan lahan tanah sebagai sumber daya alam yang potensial, maka diperlukan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang ada. Manajemen lahan yang meliputi pengelolaan lahan pertanian (lahan bercocok tanam, kehutanan, peternakan, dan perikanan), serta pengelolaan lahan untuk perumahan maupun industri.

Selain itu, perlu dilakukan penanganan/pengelolaan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendapatkan strategi yang tepat dalam penguasaan dan pengelolaan lahan tanah yang ditujukan untuk meningkatkan hasil yang semaksimal mungkin dan berkelanjutan. Menurut Supardi (1994) bahwa upaya memaksimalkan hasil, meliputi :

- (1) Memperoleh hasil atau produksi yang maksimal dari setiap unit lahan.
- (2) Memilih tata cara pengelolaan lahan yang memberikan keuntungan maksimal.
- (3) Menekan sampai sekecil mungkin ketidakmantapan kondisi

lahan potensial sehingga dapat meningkatkan hasil yang maksimal.

(4) Mencegah terjadinya penurunan lahan potensial. ****

* Dr. Ir. H. ALI HANAPIAH MUHI, MP adalah dosen/pelatih Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor.

Tulisan ini cuplikan dari isi buku yang berjudul : **“PRAKTEK LINGKUNGAN HIDUP”**

Penulis : Dr. Ir. H. Ali Hanapiah Muhi, MP

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011.